

Penolakan penerbitan sertipikat pengganti oleh kantor pertanahan di Kabupaten Bogor tinjauan yuridis putusan nomor 81 b 2011 pt tun jkt = Denial of issuance replacement land certificate by the district land office in Bogor judicial review of decision number 81 b 2011 pt tun jkt / Yulia Stefianti

Yulia Stefianti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20403592&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Tujuan Utama dari Pendaftaran tanah adalah untuk mendapatkan sertipikat. Sertipikat tersebut merupakan alat bukti yang kuat dan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah tersebut. Hal ini terdapat dalam Pasal 19 ayat 1 UUPA. Namun pada prakteknya, proses pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah tidak selalu berjalan dengan baik. Banyak hambatan dan masalah-masalah yang timbul dalam proses pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat tersebut, terbukti dengan adanya kasus penolakan penerbitan sertipikat pengganti yang terjadi di Kabupaten Bogor yang terdapat dalam Putusan Nomor : 81/ B/ 2011/ PT. TUN. JKT.). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis – normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan serta menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa penolakan penerbitan sertipikat pengganti oleh Kantor Pertanahan kabupaten Bogor telah sesuai dikarenakan sertipikat pengganti dikeluarkan jika ada sertipikat tanah yang hilang. Sehingga tidak dimungkinkan untuk diterbitkan sertipikat pengganti jika masih ada sertipikat tanah terdahulu.

<hr>

ABSTRACT

Main Purposes from land registration is to get a certificate. Those land certificate are a strong evidence and giving legal certainty for the landlord as well as mentioned in Article 19 Paragraph 1 UUPA (Agrarian Principal Laws). But in fact, practically land registration and certification is not always going well and smoothly. There is a problem arising along the process of land registration and certification, as showed on the case of refusal issuance land's certificate replacement by the District Land Office in Bogor as well as mentioned on the Court Decision Number : 81/ B/ 2011/ PT. TUN. JKT. Based on that, author interested to review the problem that caused the refusal issuance of replacement of the land' certificate. The research is based on juridical – normative method with case and statute approaching, and also using descriptive – qualitative to analyze. The research conclude that the Bogor District Land Office action refusing to issued replacement certificate is complying the statute and applicable law. This is because the land replacement certificate can be issued if the landlord had lost the previous land certificate.